

**KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PEMERINTAH INDONESIA
TERHADAP ORGANISASI TERORIS JAMAAH ANSHARUT DAULAH
(JAD) DI INDONESIA PADA TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AHMAD ROICHAN FAAZ

21323280

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PEMERINTAH INDONESIA
TERHADAP ORGANISASI TERORIS JAMAAH ANSHARUT DAULAH
(JAD) DI INDONESIA PADA TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AHMAD ROICHAN FAAZ

21323280

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia terhadap Organisasi Teroris Jamaah
Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia pada Tahun 2021-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

9 Desember 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 4 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, each on a separate horizontal line. The signatures are stylized and appear to be in cursive.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 9 Desember 2025,



Ahmad Roichan Faaz

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB 2	
PEMBAHASAN	16
2.1 Aksi Terorisme Yang Dilakukan Oleh Jamaah Ansharut Daulah.....	16
2.2 Respon Pemerintah Terhadap Tindakan Terorisme Jamaah Ansharut Daulah.....	21
2.2.1 Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia Terhadap Tindakan Terorisme.....	22
2.2.2 Kebijakan Kerjasama Indonesia Dengan Beberapa Negara.....	24
BAB 3	
ANALISIS KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP JAMA'AH ANSHARUT DAULAH (JAD)	27
3.1 Strategi Kontra Terorisme Dengan Pendekatan Proactive.....	27
3.1.1 Penangkapan Pelaku Tindak Terorisme Kelompok JAD.....	28

3.1.2 Pelacakan dan Pembekuan Sumber dan Aliran Dana Organisasi Jamaah Ansharut Daulah.....	31
3.2 Strategi Kontra Terorisme Dengan Pendekatan Defensive.....	33
3.2.1 Peningkatan Keamanan dengan Pemasangan Teknologi Pengamanan.....	34
3.2.2 Penguatan Infrastruktur Target Kelompok JAD.....	36
3.2.3 Peran Personel Keamanan Dalam Mengamankan Target Kelompok JAD.....	39
3.2.4 Penerapan Sistem Peringatan Dini Ancaman Kelompok JAD.....	42
BAB 4	
PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Rekomendasi.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Teori Kontra Terorisme oleh Todd Sandler	12
---	-----------

DAFTAR SINGKATAN

BIN	: Badan Intelijen Nasional
BNPT RI	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
DAESH	: <i>Al-Dawla Ill-Sham</i>
Densus 88	: Detasemen Khusus 88
DKPT	: Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
EWER	: <i>Early Warning Early Response</i>
IACSP	: <i>International Association for Counter-terrorism and Security Professionals</i>
IS	: <i>Islamic State</i>
ISIL	: <i>Islamic State of Iraq and Levant</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
JAD	: Jamaah Ansharut Daulah
JWG on CT	: <i>Joint Working Group on Counter Terrorism</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
Menko Polhukam	: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
TNI	: Tentara Negara Indonesia
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia masih menjadi sebuah permasalahan yang memberikan dampak buruk bagi keamanan di Indonesia. Salah satu organisasi yang memiliki jaringan terbesar di Indonesia dan berafiliasi langsung dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yaitu JAD (Jamaah Ansharut Daulah) yang menjadi salah satu organisasi yang selalu memperlihatkan perkembangannya dalam melakukan ancaman terorisme di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap organisasi JAD dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia, penelitian ini menggunakan teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler yang menggunakan dua pendekatan, yaitu *Proactive* dan *Defensive*. Adapun dua pendekatan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Proactive*, seperti penangkapan pelaku, pelacakan dan pembekuan sumber dan aliran dana JAD. Sedangkan pendekatan *Defensive*, meningkatkan keamanan terhadap korban dengan menggunakan teknologi pengamanan, penguatan infrastruktur target, melibatkan peran personel keamanan, serta penerapan sistem peringatan dini ancaman JAD.

Kata Kunci : Defensif, JAD, Kontra Terorisme, Pemerintah Indonesia, Proaktif.

ABSTRACT

The threat of terrorism in Indonesia remains a major issue that has severe impacts on national security. One of the largest terrorist organizations in Indonesia, which is directly affiliated with ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), is JAD (Jamaah Ansharut Daulah)—an organization that continues to demonstrate its development in carrying out acts of terrorism in the country. The purpose of this study is to examine the counter-terrorism policies implemented by the Indonesian government against the JAD organization from 2021 to 2023. In analyzing the Indonesian government's policies, this research employs Todd Sandler's counter-terrorism theory, which consists of two main approaches: Proactive and Defensive. The Proactive approach includes actions such as arresting perpetrators, tracing and freezing JAD's financial networks and funding sources. Meanwhile, the Defensive approach focuses on enhancing protection for potential victims by improving security technology, strengthening the infrastructure of potential targets, involving security personnel, and implementing early warning systems against JAD threats.

Keywords : Counter Terrorism, Defensive, Indonesian Government, JAD, Proactive.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamaah Ansharut Daulah atau biasa dikenal dengan JAD merupakan salah satu organisasi teroris yang memiliki jaringan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh seseorang yang bernama Aman Abdurrahman di lapas Nusakambangan pada tahun 2014 (Fathurohman 2018). Aman Abdurrahman dikenal dengan julukan “Bapak Takfiri Indonesia” memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan baik, Aman juga merupakan seorang pendakwah tentang isu tauhid dan jihad yang mulai berdakwah dalam kelompok Tauhid Wal Jihad pada tahun 2004. Aman juga aktif dalam menerjemahkan buku karya Abu Muhammad al-Maqdisi yang kemudian diedarkan di kalangan militan secara luas yang membuat Aman mendapatkan banyak panggilan untuk mengisi ceramah di berbagai tempat dengan membawa Tauhid Wal Jihad menjadi kelompok formal yang aktif dalam melakukan propaganda (Dalimunthe 2018).

Nama Aman semakin terkenal setelah kelompok ISIS resmi mendeklarasikan diri di Suriah yang kemudian Aman disebut-sebut sebagai pionir berdirinya gerakan ISIS di Indonesia (Dalimunthe 2018). Pada waktu itu Aman Abdurrahman memanggil orang terdekatnya yang bernama Marwan atau Abu Musa dengan Zainal Anshori untuk datang ke Nusakambangan dan menyampaikan niatnya untuk membentuk Khilafah Islamiyah yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang Indonesia yang memiliki keinginan untuk pergi berperang ke Suriah dan mendukung ISIS, terutama untuk

orang-orang yang telah berbaiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi. Aman menyadari bahwa kekuatan jamaah pengikut pendukung ideologi khilafah cukup banyak di Nusantara serta banyaknya pendukung ISIS yang masih berkeliaran di luar penjara (Tifada 2021).

Jamaah Ansharut Daulah telah melakukan beberapa aksi terorisme, salah satu diantaranya pada tanggal 28 Maret 2021 terjadi aksi terorisme yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang baru saja menikah selama enam bulan dengan melakukan bom bunuh diri di depan halaman gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan 19 korban luka yang kemudian dirawat di RS Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak kepolisian menyatakan bahwa aksi teror bom yang terjadi di Makassar tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua orang yang berasosiasi dengan organisasi teroris JAD, dan motif dari pelaku tindakan kekerasan bom tersebut adalah karena adanya tindakan pembalasan dendam terhadap tertangkapnya jaringan JAD Sulawesi Selatan dan dikarenakan adanya seruan perintah dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang merupakan organisasi teroris internasional yang memberikan perintah untuk melakukan aksi terorisme di setiap masing-masing negara (BBC News Indonesia 2021).

Serangan terorisme yang terus terjadi membuat masyarakat tidak dapat mendapatkan rasa tenang karena bisa mengancam nyawa mereka. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa untuk menjamin keamanan masyarakat, maka anggota Polri dan personel TNI melakukan kerjasama agar dapat memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat. Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada Kapolri dan semua aparat negara untuk

mengusut tuntas jaringan dari bom bunuh diri di Makassar tersebut dan tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam itu akan terjadi lagi. Terorisme merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap manusia yang tidak ada keterkaitan dengan agama apapun, karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme dengan motif apapun. Serangan yang terjadi di Makassar tersebut juga dinyatakan sebagai serangan yang memiliki tujuan untuk mengadu domba masyarakat dengan tanpa motif agama apapun, yang menyatakan seakan-akan sebuah kelompok tertentu sedang melakukan penyerangan terhadap kelompok lain yang berdasarkan dengan ikatan primordial (BBC News Indonesia 2021).

Menurut Databoks, pada tahun 2020 terdapat 232 tersangka terorisme yang tercatat, dan pada tahun 2021 terdapat 370 tersangka terorisme yang tercatat, yang artinya eksistensi terorisme di Indonesia meningkat sebanyak 59,84% sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi beberapa kasus yang dilakukan di Indonesia, diantara kasus terorisme di Indonesia adalah pengeboman gereja Katedral di Makassar, yang dilakukan oleh L dan YSF yang merupakan anggota bagian dari JAD (Annur 2022). Kemudian sepanjang Oktober 2023, 59 tersangka terorisme di Indonesia telah ditangkap oleh Densus 88 di beberapa wilayah. Juru Bicara Densus 88 menyatakan bahwa 40 dari 59 tersangka teroris merupakan anggota JAD yang mendukung organisasi ISIS berencana ingin menggagalkan Pemilu 2024. Untuk detailnya, Juru Bicara Densus 88 Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan bahwa 23 orang yang ditangkap berada di Jawa Barat, 11 orang berada di DKI Jakarta, dan 6 orang lainnya berada di Sulawesi Tengah. (Rohmawati 2023).

Densus 88 telah menangkap 144 tersangka terorisme sepanjang tahun 2023. Di antara 144 tersangka, 68 tersangka merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan 51 anggota Jamaah Islamiyah (JI), dan organisasi terorisme lainnya, dengan barang bukti yang sudah diamankan oleh Densus 88 yang merupakan senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak. Selain itu jaringan JAD tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti 5 jaringan di Sumatera Utara, 14 jaringan di Sumatera Barat, 8 Jaringan di Riau, 19 Jaringan di Lampung, 28 Jaringan di Jakarta, 26 Jaringan di Jawa Barat, 27 Jaringan di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi jaringan JAD yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Tirto.id hingga tahun 2023 tindakan pemerintah terhadap pelaku terorisme paling banyak yaitu kepada jaringan JAD dan pada tahun 2023 jumlah tindakan terorisme menurun 40,89 % jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Mumpuni 2023).

Penelitian ini dimulai pada tahun 2021 hingga 2023, karena pada tahun 2021 hingga 2023 angka eksistensi terorisme di Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan pada tahun tersebut JAD melakukan tindakan terorismenya dengan melakukan salah satu tindakan yang mengancam masyarakat dengan melakukan pengeboman di suatu gereja di Makassar. Serta penelitian ini mengambil tahun 2021 hingga tahun 2023, karena sejak 2021 angka eksistensi terorisme di Indonesia meningkat hingga akhir tahun 2023 yang terdapat 68 tersangka dari 144 tersangka yang merupakan anggota JAD, serta karena tindakan pemerintah terhadap terorisme di Indonesia lebih banyak terhadap organisasi JAD, sehingga hal ini menarik untuk dikaji bagaimana kebijakan kontra terorisme pemerintah Indonesia terhadap jaringan organisasi terorisme ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalahnya. Bagaimana kebijakan kontra terorisme pemerintah Indonesia dalam menghadapi organisasi Teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia pada tahun 2021-2023?.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberitahukan mengenai penelitian ini membahas tentang salah satu gerakan terorisme di Indonesia, dan memiliki tujuan penelitian untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana kebijakan kontra terorisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil salah satu kasus yang dilakukan oleh organisasi Teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia pada tahun 2021-2023.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Kontra Terorisme oleh Todd Sandler dalam menghadapi organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) pada tahun 2021-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada tentang bagaimana kebijakan kontra terorisme pemerintah Indonesia dalam menghadapi organisasi Terorisme Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia pada tahun 2021-2023. Dalam jangka pemilihan waktu, penelitian ini berfokus pada kebijakan kontra terorisme pemerintah Indonesia dalam menghadapi organisasi Terorisme Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia pada tahun 2021-2023. Pemilihan tahun 2021 dilakukan karena pada tahun tersebut organisasi teroris Jamaah Ansharut Daulah menjalankan salah satu aksi terorismenya yang mengancam masyarakat dengan melakukan bom bunuh diri di salah satu gereja di Makassar (BBC News Indonesia 2021) dan salah satu tersangka yang terafiliasi dengan JAD dengan melakukan penyerangan terhadap Markas Besar Polri pada akhir 2021 (Gual 2021), dan pada tahun tersebut angka tersangka terorisme meningkat dibandingkan tahun 2020. Pada sebelum tahun 2021 terdapat 232 tersangka terorisme dan pada tahun 2021 terdapat 370 tersangka terorisme yang artinya meningkat sebanyak 59,84% dibandingkan pada tahun sebelum 2021 (Annur 2022). Di sisi lain, pemilihan tahun 2023 dilakukan karena pada tahun tersebut pemerintah telah menangkap 144 tersangka terorisme dan 68 di antaranya adalah anggota JAD, dan hingga tahun tersebut tindakan pemerintah terhadap pelaku terorisme paling banyak yaitu kepada jaringan JAD (Mumpuni 2023), dan sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 tidak adanya serangan teroris di Indonesia satu pun, dan indeks pencegahan terorisme di Indonesia makin membaik pada tahun 2024 (Khalida 2024).

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mencari informasi dari beberapa penelitian sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Dalam literatur pertama yang berjudul “Movement and Thoughts of Jamaah Ansharut Daulah (JAD): Terrorism Group in Indonesia” yang ditulis oleh Dedy Tabrani dan Aly Ashghor yang menjelaskan bahwa JAD merupakan gerakan pemersatu pendukung berdirinya Daulah Islam pasca-al-Qaeda, dan JAD mendirikan jaringan lintas komunitas antara pendukung ISIS di Indonesia. Kekerasan yang dilakukan oleh JAD direproduksi sebagai perang akhir zaman, dan mendoktrin pendukungnya untuk melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan jihad. Dalam literatur tersebut hanya membahas mengenai pergerakan dan pemikiran organisasi JAD di Indonesia, tapi tidak membahas bagaimana kebijakan kontra terorisme pemerintah Indonesia dalam menghadapi organisasi Teroris JAD di Indonesia pada tahun 2021-2023, disinilah beda antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya (Tabrani and Ashghor 2023).

Pada literatur yang kedua yang digunakan sebagai tinjauan pustaka yang merupakan jurnal yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia” yang ditulis oleh Joni Paamsyah yang menggambarkan dan menilai tentang berbagai strategi yang digunakan Indonesia dalam memerangi terorisme yang sesuai dengan UU NO. 15 Tahun 2018. Literatur yang ditulis oleh Joni Paamsyah membahas mengenai gambaran dan menilai beberapa strategi Indonesia yang sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2018, akan tetapi dalam penelitian saya kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai berbagai

upaya dalam menanggulangi tindak terorisme di Indonesia dengan menggunakan upaya pendekatan yang ada di Teori Kontra Terorisme (Paamsyah et al. 2023).

Dalam melakukan sebuah kebijakan pasti akan terjadi sebuah kegagalan dan keberhasilan seperti dalam literatur ketiga yang berjudul “Keberhasilan dan Kegagalan Indonesia dalam Kebijakan Kontra Terorisme” yang ditulis oleh Raka Gusfi Wisesa yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keberhasilan dan kegagalan dalam menangani terorisme di Indonesia. Namun, saya sebagai peneliti dalam penelitian kali ini tidak hanya membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keberhasilan dan kegagalan seperti yang tertera dalam literatur tersebut akan tetapi membahas bagaimana kebijakan kontra terorisme Indonesia dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap organisasi JAD (Wisesa 2021).

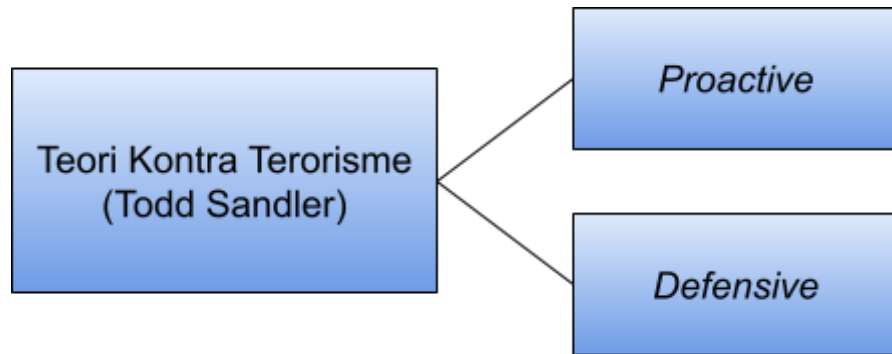
Kekurangan dalam literatur-literatur tersebut adalah hanya membahas bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh organisasi JAD di Indonesia, tetapi tidak membahas bagaimana tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap organisasi JAD. Kemudian, dalam literatur kedua membahas tentang strategi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi JAD yang sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2018, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap JAD dengan menggunakan Teori Kontra Terorisme. Selain itu, salah satu literatur di atas membahas tentang keberhasilan dan kegagalan kebijakan kontra terorisme Indonesia sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas tentang keberhasilan dan kegagalan melainkan membahas tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap organisasi JAD di Indonesia. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan

untuk mengisi celah yang terdapat pada literatur-literatur tersebut dengan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan kontra terorisme Indonesia terhadap Jamaah Ansharut Daulah. Literatur tersebut akan digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data kemudian akan mengolahnya dengan menggunakan Teori Kontra Terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler dalam jurnalnya yang berjudul “*Collective versus Unilateral Responses to Terrorism*” dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Kontra terorisme itu sendiri merupakan sebuah strategi terhadap respon kepada upaya menghentikan pergerakan organisasi atau kelompok terorisme, dengan tindakan penanggulangan tindakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi serta menghentikan serangan terorisme. Dengan teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap upaya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap organisasi terorisme Jamaah Ansharut Daulah. Teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler memiliki dua langkah yang digunakan dalam upaya melawan terorisme yakni *Proactive* dan *Defensive* (Sandler 2005).

Gambar 1.1 Konsep Teori Kontra Terorisme oleh Todd Sandler



Sumber: Todd Sandler (2005).

Langkah pertama yakni *Proactive* yang dilakukan secara langsung dalam melawan organisasi JAD dengan upaya mengurangi dan meredam potensi tindakan serangan terorisme dengan fokus terhadap kelompok teroris, jaringan teroris, serta pendukung teroris. Langkah *proactive* secara khusus diarahkan kepada para pelaku terorisme, sumber daya yang mereka manfaatkan, serta pihak-pihak pendukung mereka secara langsung. Langkah ini bertujuan untuk melemahkan kapasitas operasional kelompok teroris, sekaligus menekan frekuensi dan intensitas serangan terhadap berbagai target yang berisiko. Tindakan-tindakan tersebut mencakup serangan terhadap kamp pelatihan teroris, pembunuhan terhadap pimpinan teroris, pembekuan aset yang terkait dengan terorisme, pemberian sanksi atau tindakan balasan terhadap negara sponsor, pengumpulan intelijen untuk melakukan infiltrasi ke dalam jaringan teroris. Langkah *Proactive* cenderung memiliki potensi untuk mendapatkan serangan balik dari teroris (Sandler 2005).

Langkah kedua yakni langkah *Defensive* yang berfokus pada upaya melindungi target potensial dari ancaman serangan teroris atau meminimalisasi dampak yang ditimbulkan apabila serangan terjadi. Langkah *Defensive* ini dapat mencakup penerapan teknologi pengamanan, seperti penggunaan alat pendeteksi bahan peledak, detektor logam, maupun sistem identifikasi biometrik, penguatan infrastruktur target, seperti pemasangan penghalang di area strategis seperti gedung pemerintahan, pengerahan personel keamanan, seperti penempatan petugas keamanan pada penerbangan komersial, dan penerapan sistem peringatan dini terkait potensi ancaman terorisme. Oleh karena itu tindakan *Defensive* mampu membuat kondisi negara menjadi lebih aman dengan menggunakan pengalihan serangan teror ke wilayah lain. Langkah *Defensive* biasanya tidak menimbulkan serangan balasan dari teroris (Sandler 2005).

Langkah yang telah disebutkan di atas mampu diimplementasikan dengan tema internasional dalam teori kontra terorisme yakni *Proactive* dan *Defensive* ataupun keduanya yang dilakukan dalam pendekatan teori kontra terorisme yang lebih efektif dalam penelitian ini. Dalam teori yang dikemukakan oleh Todd Sandler terhadap konsep kontra terorisme, juga termasuk yang telah dikemukakan di atas dapat menjadi sebuah pondasi yang digunakan dalam membangun argumen yang mendukung kebijakan kontra terorisme Indonesia dalam menangani organisasi Jamaah Ansharut Daulah dari tahun 2021 hingga 2023. Dari jurnal tersebut memberi pemahaman apabila hanya satu pendekatan yang diterapkan maka strategi tidak akan berjalan dengan baik. Lalu, langkah-langkah yang diambil akan disesuaikan dengan pencarian data yang tepat dalam kurun waktu yang diambil dalam penelitian kali ini yakni 2021-2023 (Sandler 2005).

1.7 Argumen Sementara

Setelah melakukan observasi dengan menggunakan beberapa data yang mendukung penelitian saya, peneliti memiliki pendapat bahwa berdasarkan beberapa data yang didapatkan terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada organisasi Jamaah Ansharut Daulah dari tahun 2021-2023, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan *Proactive* dan *Defensive*. Pertama, *Proactive* menurut teori kontra terorisme oleh Todd Sandler adalah sebuah langkah yang diarahkan khusus kepada pelaku-pelaku terorisme, kepada sumber daya yang mereka gunakan, dan pihak-pihak pendukung mereka secara langsung yang dilakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap pemimpin utama JAD. Namun tidak terhadap pimpinan wilayah JAD, karena menurut Wakil Ketua Komnas HAM tugas Densus 88 adalah melumpuhkan musuh bukan mematikan musuh (Hukum Online 2010). Menangkap pelaku tindak terorisme kelompok JAD, pelacakan dan pembekuan aset atau sumber dana yang digunakan oleh JAD selama tahun 2021 hingga tahun 2023.

Pemerintah Indonesia tidak melakukan penyerangan terhadap kamp-kamp teroris JAD karena penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui penegakan hukum oleh Polri atau Densus 88 bukan melalui operasi militer, dan karena menurut UU Nomor 5 tahun 2018 Pasal 43A Ayat 2 Pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme harus dilandasi dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip kehati-hatian. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya infiltrasi oleh intelijen Indonesia terhadap kelompok JAD, namun rincian dari strategi tidak dipublikasikan karena alasan keamanan operasi, tetapi Indonesia melakukan

infiltrasi kedalam kelompok JAD dengan strategi Human Intelligence untuk mengumpulkan informasi terkait kelompok JAD seperti penangkapan anggota-anggota kelompok JAD.

Kedua, *Defensive* menurut teori kontra terorisme oleh Todd Sandler adalah sebuah langkah yang dilakukan dengan melakukan peningkatan keamanan pemasangan teknologi pengamanan seperti alat pendeteksi bom, alat detektor logam, atau identifikasi biometrik, melakukan penguatan terhadap infrastruktur target aksi terorisme oleh kelompok JAD, mengerahkan personel keamanan dalam mengamankan target dari kelompok JAD, serta menerapkan sistem peringatan dini terhadap aksi terorisme kelompok JAD selama tahun 2021 hingga tahun 2023.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi kali ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sifat deskriptif, alamiah atau penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau angka, dan penelitian yang menekankan pada sifat realita yang dibangun secara sosial (Walidin, Saifullah, and ZA 2015).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun untuk subjek dalam penelitian ini merupakan Pemerintah Indonesia, dan adapun untuk objek dalam penelitian ini merupakan Kontraterorisme.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan oleh peneliti merupakan metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu mendefinisikan masalah dalam penelitian sosial yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian berikutnya, dan data sekunder menjadi komponen penting dalam penelitian yang baik (Nugroho 2022). Data-data didapatkan melalui buku, jurnal atau artikel, dan laporan. Sehingga berita yang sudah dipastikan kebenarannya atau tervalidasi faktanya yang terkait dengan rumusan masalah pada penelitian kali ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengawali proses penelitian dengan proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Data yang akan dikumpulkan menggunakan media online seperti buku, jurnal, hingga data laporan artikel yang relevan dengan topik pada penelitian kali ini yaitu Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia dan pengimplementasiannya terhadap organisasi Jamaah Ansharut Daulah. Kemudian setelah proses pengumpulan data, dalam proses reduksi data, peneliti akan mengolah hasil data yang digunakan kredibel terhadap penelitian kali ini. Kemudian ketika data-data yang diperoleh sudah lengkap, maka peneliti akan menyajikannya dalam bentuk penulisan deskripsi yang sesuai dengan setiap bagian bab dengan detail. Selanjutnya penulis akan membuat

interpretasi terhadap data-data yang telah diperoleh yang hanya bersifat sementara dan akan menjadi sebuah kesimpulan hasil dari penelitian kali ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kali ini terdapat pembahasan 4 bab utama yaitu :

- **Bab 1**, yang berisi membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- **Bab 2**, yang menyajikan pembahasan mengenai penelitian tentang kajian dari penelitian dan sumber yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian kali ini yang dilakukan oleh peneliti, lalu pada bab ini menjelaskan mengenai aksi terorisme yang dilakukan oleh Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta respon dari pemerintah Indonesia terhadap tindakan terorisme JAD.
- **Bab 3**, yang berisi mengenai keterkaitan teori Todd Sandler dengan studi kasus yang dibahas, sehingga akan menghasilkan sebuah analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian kali ini.
- **Bab 4**, yang berisikan bagian terakhir penelitian ini dengan melakukan rangkuman dari seluruh data yang telah diperoleh dalam penelitian ini sebagai kesimpulan dari seluruh penelitian ini yang akan mencakup hasil akhir penelitian dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

PEMBAHASAN

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama Muslim menjadi salah satu alasan mengapa terorisme dapat muncul di Indonesia. Bahkan terorisme sudah masuk di negara Indonesia sebelum tahun 2000-an, namun organisasi terorisme JAD baru dibentuk pada pertengahan tahun 2014 dan pertama kali melakukan tindak terorismenya pada Januari 2016 di Jakarta. Tindakan terorisme JAD yang telah dilakukan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia tidak bisa mengabaikan akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh JAD. Beberapa tindakan terorisme JAD mengakibatkan banyak korban luka bahkan kehilangan nyawa (Pandu 2019).

Pada Bab II peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah pertama kali berdirinya JAD di Indonesia, tindakan-tindakan yang telah dilakukan sejak berdirinya JAD di Indonesia, metode-metode penyebaran yang dilakukan JAD untuk menjalankan aksi tindakan terorismenya di Indonesia, dan bagaimana respon pemerintah Indonesia terhadap JAD.

2.1 Aksi Terorisme Yang Dilakukan Oleh Jamaah Ansharut Daulah

Ekstremisme dalam agama telah terjadi sejak lama, terutama dalam dunia Islam. Pada periode Khulafaur Rasyidin terdapat gerakan Khawarijisme yang merupakan penyebab pertama kali memunculkan paham Takfiri secara ekstrem terhadap umat Islam sehingga menimbulkan paham radikal lainnya. Sehingga pandangan dunia ini terhadap agama Islam berawal dari fenomena awal ekstremisme yang menjadi pedoman bagi kelompok-kelompok Islam garis keras

berikutnya. Salah satu gerakan ekstrimis muncul di negara Indonesia, negara yang memiliki banyak ragam agama dengan serangkaian kasus peledakan bom yang menelan banyak korban jiwa. Mereka menyebut diri mereka sebagai gerakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman (Habibullah 2023).

Aman Abdurrahman atau disebut dengan Oman merupakan seseorang yang dipandang sebagai pionir ISIS Indonesia, seseorang pendakwah tentang isu tauhid dan jihad dalam kelompok Tauhid Wal Jihad, seseorang yang mengagumi Abu Muhammad al-Maqdisi seorang tokoh ideologi jihad Al-Qaidah. Namun, pada tahun 2004-2008 Aman dipidana penjara terkait kasus peledakan bom. Selama di penjara, Aman aktif menerjemahkan buku karya Abu Muhammad al-Maqdisi kemudian menyebarkannya kepada kalangan militas secara luas sehingga membuat dirinya terkenal. Pada tahun 2010, Aman kembali ditangkap karena Aman mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh Besar. Karena aktivitasnya di dalam penjara, Aman mulai dipantau oleh kelompok ekstrem lainnya sehingga membuat Aman menjadi tokoh yang menjadi rujukan ideologi yang selalu diminta untuk mengeluarkan fakta yang memberikan jawaban di antara anggota kelompok ekstremnya (tirto.id 2018).

Aman juga merupakan seorang pendakwah yang banyak mendapatkan panggilan ceramah di berbagai tempat dengan membawa Tauhid Wal Jihad menjadi kelompok yang aktif dalam melakukan propaganda, serta Aman mempublikasikan naskah terjemahannya melalui situs internet millahibrahim.com. Buku materi Tauhid yang dipublikasikan Aman terbagi menjadi beberapa bagian pokok, prinsip ketauhidan dalam makna taghut, kritik terhadap sistem demokrasi

sebagai bagian tradisi taghut, lalu penegasan Aman terkait penolakan terhadap pemerintah Indonesia. Nama Aman Abdurrahman semakin terkenal ketika kelompok militan ISIS resmi mendeklarasikan diri di Suriah, dan Aman disebut-sebut sebagai pionir lahirnya gerakan ISIS di Indonesia (Dalimunthe 2018).

Pada akhir tahun 2014 di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan, di Cilacap, Jawa Tengah Aman Abdurrahman mendirikan JAD. Tujuan Aman mendirikan JAD adalah sebagai organisasi yang mewadahi kelompok-kelompok jihad yang mendukung ISIS di Indonesia. Aman juga telah menyatakan kesetiaan dirinya terhadap Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pimpinan ISIS, dan Aman telah mengabdikan dirinya dengan diberikan izin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi untuk mengerahkan pendukung ISIS di Indonesia (Habibullah 2023). Kepala BNPT menyatakan Aman merupakan orang pertama yang berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi ketika mendeklarasikan ISIS pada 29 Juni 2014 dan menganjurkan para pengikutnya untuk berangkat ke Suriah (Durohman, Rifai, and Hikmat 2016). Jumlah pasukan hisbah yang dimiliki kelompok-kelompok jihad di Indonesia dan JAD merupakan kelompok yang mempunyai pasukan hisbah dengan jumlah yang cukup banyak. (Habibullah 2023).

JAD mempercayai pemahaman yang dinamakan Takfiri. Pemahaman Takfiri itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai pemahaman yang mempercayai bahwa apapun yang berasal bukan dari Allah SWT itu disebut sebagai haram, dan kepada siapapun yang tidak mempercayai pemahaman ini atau menganggap pemahaman tersebut itu merupakan pemahaman yang salah maka mereka akan dianggap sebagai kafir dan layak untuk dijadikan musuh bahkan

tidak segan untuk dibunuh karena dianggap kafir. JAD yang mempercayai pemahaman ini begitu membahayakan, dikarenakan JAD tidak segan untuk membunuh bagi siapapun yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka sendiri. JAD yang menyatakan bahwa perang merupakan sebuah kewajiban terhadap siapapun yang beragama Islam dan yang telah mencapai usia baligh atau dewasa diwajibkan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam yang tidak terkecuali negara-negara barat. Selain itu, JAD menghalalkan cara merampok atau mencuri untuk pendanaan yang diperlukan oleh JAD itu sendiri karena mereka beranggapan bahwa cara tersebut halal untuk dilakukan karena untuk memerangi kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan mereka (Asrori 2019).

Dalam sebuah wawancara, pada saat Aman di Lapas Lembang Kuning Nusakambangan banyak melakukan baiat dan masuk ke blok warga binaan untuk memaksa supaya paham Aman sama dengan paham mereka. Ketika mendirikan JAD, Aman mengajak Marwan dan Zainal Anshori untuk menyampaikan tentang Daulah Islamiyah ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dan umat islam mendukungnya. Aman melakukan baiat ISIS secara beramai-ramai dengan menganggap yang tidak berbaiat akan dianggap murtad, dan akan mengubah wajah pada foto mereka yang tidak berbaiat menjadi gambar sapi atau anjing daa dikafirkan menurut hukum syariat Islam darahnya halal atau berhak untuk dibunuh (BBC News Indonesia 2020). JAD juga melakukan perekrutan anggota dengan cara melalui dakwah mengenai betapa pentingnya melakukan hijrah dan tauhid atas dasar ajaran Tuhan untuk membela agama Islam yang dilakukan di beberapa tempat ibadah yang menyebar luas di Indonesia (Pandu 2019).

Dalam proses perekrutan anggota, JAD tidak memerlukan perekrutan dengan kaderisasi serta proses indoktrinasi panjang, karena tanpa bekal agama yang cukup orang dapat bergabung ke dalam JAD. Rekrutmen, pelatihan amaliah, ideologisasi kadang juga dilakukan oleh JAD dengan melalui daring, karena sel-sel JAD memang termasuk paling aktif dalam menggunakan *platform* media sosial jika dibandingkan dengan JI yang memerlukan perekrutan yang ketat serta indoktrinasi panjang dalam merekrut anggotanya. Sel JAD umumnya tidak membutuhkan kemampuan militer yang mumpuni seperti anggota JI yang melakukan pelatihan khusus di Afghanistan, karena pada umumnya mereka tidak menerima *tadrīb 'askarī* yang terstruktur dan sistematis sehingga dalam pelaksanaan aksinya hanya sekelas bom panci. Kemudian mereka mengambil pola baru dengan melibatkan keluarga serta anak-anak untuk mengaburkan identifikasi aparat dan mengirim sinyal ke sel JAD yang lain bahwa mereka telah memberikan kewajiban yang sudah menjangkau keluarga, istri, hingga anak-anak (Syeirazi 2018).

Pola penyerangan yang dilakukan oleh anggota JAD maupun anggota teroris lainnya secara umum melakukan pola yang hampir sama yaitu memfokuskan penyerangan terhadap pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam yang termasuk pejabat negara maupun aparat keamanan negara (Pandu 2019). Sepak terjang yang dilakukan oleh JAD banyak melakukan penyerangan terhadap polisi, dan tidak hanya dengan menggunakan penyerangan skala besar namun juga menggunakan penyerangan aksi perseorangan (Nugroho 2018). Dalam salah satu aksi terorisme, JAD melakukan strategi dengan memecah belah

fokus para polisi dengan mengalihkan serangan dari salah satu tempat ke berbagai tempat mereka berpencar (Amindoni 2018).

Pernyataan yang diberikan oleh Aman Abdurrahman mengenai Indonesia merupakan negara berstatus kafir memiliki berbagai alasan dan latar belakang. Yaitu, karena hukum yang dijalankan di Indonesia tidak seperti hukum yang diperintahkan oleh Allah dengan cara memalingkan wewenang membuat hukum-hukum dan undang-undang di Indonesia kepada selain Allah, karena negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan demokrasi dan memiliki ideologi dasar negara Pancasila. Selain itu, alasan Aman menyatakan bahwa negara Indonesia berstatus kafir dikarenakan pemerintahan negara Indonesia memiliki loyalitas dengan orang kafir yang berada di negara-negara di Eropa, serta pemerintah mengadakan laporan tentang kasus persengketaan kepada lembaga-lembaga internasional seperti PBB yang memiliki dasar hukum tidak sejalan dengan hukum Islam. Serta memberikan hak kepada masyarakat untuk berbuat musyrik atau kafir dengan dalih kebebasan beragama dan menyamakan antara orang kafir dan orang muslim. (Asrori 2019).

2.2 Respon Pemerintah Terhadap Tindakan Terorisme Jamaah Ansharut Daulah

Dalam menanggapi aksi terorisme yang dilakukan oleh organisasi JAD di Indonesia yang menyebabkan ancaman terorisme, Pemerintah Indonesia perlu memberikan respons terhadap organisasi JAD dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia Terhadap Tindakan Terorisme

Ancaman tindakan terorisme pada saat ini yang berawal dari konvensional kemudian mengalami pergeseran menggunakan media siber teknologi yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman yang membuat potensi jatuhnya korban semakin besar karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi siber dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan mereka tidak akan meninggalkan pendekatan secara tradisional secara menyeluruh (Maslikan and Priyanto 2025). Upaya Nasional dan Internasional dilakukan dalam penanggulangan tindak terorisme dilakukan dengan cara memperluas dan memperdalam kerjasama antar lembaga. Dalam hal ini, eksplorasi bidang-bidang baru dalam kerjasama internasional dengan tujuan untuk melawan terorisme menjadi sebuah keutamaan ketika sebuah aksi tindakan terorisme semakin intensif (Kurniawan et al. 2020).

Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Menkopolkam RI pada tahun 2002 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang terdiri dari pejabat lintas departemen seperti Kemenlu, Kemenhan, Kemendagri, TNI, Polri, Badan Intelijen Nasional, Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia dan langsung berada di bawah koordinasi Menkopolkam RI merupakan embrio dari terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tujuan dibentuknya DKPT itu sendiri adalah untuk mensinergikan serta mengkoordinasikan institusi-institusi yang terdapat dalam bidang penanggulangan terorisme di Indonesia (Kurniawan et al. 2020).

Pada 20 September 2021, BNPT menggelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional terhadap Penanggulangan Terorisme di Kalimantan Timur, yang

kemudian dilanjutkan pada 21 Maret 2023 BNPT mengadakan seminar kebangsaan Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme. Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kesbangpol dengan Mabes TNI dan dengan Yayasan Crisis Center Deradikalisme Pencegahan Terorisme Kalimantan Timur. Seminar kebangsaan yang diadakan turut menghadirkan narasumber seorang Mantan Napiter yang telah kembali ke NKRI yaitu Ust. M. Yunus, S.Ag, Mantan Napiter Bom Bali 1 Fazri Pahlawan (Abu Zee) Amir JAD, Mantan Napiter dari Bekasi, dan Wildan Fauzi Bahresi Al Qathoni alias Umair Mantan Napiter Jihadis ISIS (Maslikan and Priyanto 2025).

Tindakan terhadap JAD dengan memberatkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik dari pemufakatan tindakan kejahatan, persiapan dan percobaan bahkan pembantuan dengan tujuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme. Selain pemberatan sanksi, terdapat juga perluasan sanksi pidana terhadap organisasi atau korporasi yang diberikan kepada para pendiri, pemimpin, pengurus maupun orang yang mengarahkan korporasi. Penambahan pidana juga ditetapkan kepada para pelaku tindak pidana terorisme seperti pencabutan hak dalam memiliki paspor dalam kurun waktu yang ditentukan, dan juga penambahan waktu penangkapan, penahanan pidana, dan memperpanjang penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum terhadap berkas perkara Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban Tindak Pidana Terorisme yang merupakan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pencegahan juga dilakukan oleh institusi terkait yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing yang telah

dikoordinasikan oleh BNPT, serta peran TNI, dan pengawasannya (DATABASE PERATURAN 2018).

Hukuman paling minimum yang diberikan kepada para pelaku baik yang telah melakukan tindakan terorisme atau belum melakukan yaitu empat tahun penjara, sedangkan hukuman yang paling maksimum adalah hukuman mati jika pelaku dinyatakan terlibat secara langsung dalam tindakan terorisme ataupun mereka yang menyebarkan dan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan terorisme. Asludin Hatjani sebagai pengacara JAD telah melakukan konsultasi dengan pengurus yang mewakili JAD yaitu Ustadz Zainal Ansori dan mengatakan bahwa JAD menerima keputusan yang diberikan dan tidak akan mengajukan banding. Polisi Republik Indonesia juga menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sewajarnya karena mereka merupakan wadah aksi terorisme, sekaligus dapat menjadi payung hukum kepada Polri (Aziz 2018).

2.2.2 Kebijakan Kerjasama Indonesia Dengan Beberapa Negara

Kerjasama internasional dilakukan oleh banyak negara di dunia dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap tantangan yang harus mereka hadapi secara bekerjasama. Salah satu mekanisme yang dilakukan oleh beberapa negara untuk berkolaborasi dalam mengatasi isu terorisme yaitu dengan Perjanjian Internasional yang memiliki sifat multilateral, dan juga berkolaborasi dengan negara lain secara bilateral. BNPT diberikan amanat untuk melakukan sebuah perencanaan terkait program kontra terorisme di Indonesia. BNPT melakukan rencana dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak eksternal untuk menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Hingga pada 7 April tahun 2021 BNPT dengan Britania

Raya (*The Homeland Security Mission of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) melakukan kesepakatan kerja sama Memorandum Saling Pengertian (MoU) dalam hal Kerjasama Kontra Terorisme (Hutami, Azhar, and Aulia 2023).

Pada tahun 2021 Indonesia melakukan beberapa Kerjasama Bilateral dengan beberapa negara terkait penanggulangan terorisme, diantaranya adalah kerjasama bilateral Indonesia dengan Serbia, Belgia, dan Rumania. Indonesia telah melakukan hubungan diplomatik dengan Serbia sejak 1954 di bidang politik dengan pertemuan konsultasi bilateral di berbagai fora internasional. Kemudian pada tahun 2021, Indonesia memperluas bidang kerjasama dengan Serbia di bidang penanggulangan terorisme dengan ditandatanganinya MoU on Preventing and Fighting Transnational Crimes and Capacity Building. Hubungan bilateral Indonesia dengan Rumania telah berjalan dengan baik, sehingga pada tanggal 3 Maret 2021 Indonesia-Rumania mencapai kesepakatan dalam ditandatanganinya MoU on Counter-Terrorism Cooperation antara BNPT dengan Romanian Intelligence Service (RIS). Selain itu, Indonesia juga melakukan hubungan bilateral dengan Belgia yang memiliki fokus hubungan bilateral dalam bidang diplomasi ekonomi, pengembangan SDM di Indonesia, serta mitra Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme dan penyelundupan narkoba dari Kawasan Eropa (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2025).

BNPT telah menyelenggarakan pertemuan konsultasi bilateral ke-8 pada April 2022 dengan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) di Sydney, Australia. Pertemuan konsultasi bilateral yang merupakan pertemuan rutin setiap tahun antar kedua negara dalam membahas isu terorisme di tingkat bilateral,

nasional, dan regional, dan saling berbagi informasi intelijen yang seharusnya dilakukan pada tahun 2021 akan tetapi diundur hingga tahun 2022 dikarenakan pandemi. Pertemuan tersebut merupakan satu upaya kedua belah pihak untuk memperkuat kerjasama terkait penanggulangan terorisme melalui dialog penting berdasarkan nota Kesepahaman antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia terkait Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2022).

Pada pertemuan tersebut terdapat empat agenda, diantaranya adalah pandangan kedua negara dalam perspektif ancaman dalam lingkup domestik, regional, dan global, serta informasi terbaru tentang kemitraan antara kedua pihak untuk memperkuat *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)*. Hal yang dijadikan sorotan merupakan kebijakan strategi nasional yang dikembangkan oleh Australia terkait dengan penanggulangan terorisme yang sebelumnya mempunyai persamaan dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah kepada Terorisme (RAN PE) yang dimiliki Indonesia. Kemudian, kesepakatan kedua belah pihak terkait pengembangan kerjasama teknis terkait isu radikalisasi online, dan pendanaan terorisme terutama dalam hal penyalahgunaan teknologi digital (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2022).

BAB 3

ANALISIS KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP JAMAAH ANSHARUT DAULAH (JAD)

Tindak pidana terorisme merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok teroris. Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan ancaman terorisme oleh beberapa kelompok teroris, salah satunya kelompok JAD. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang melawan tegas dengan gencar mengadakan perang untuk melawan tindak pidana terorisme. Indonesia melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan menerapkan kebijakan kontra terorisme. Indonesia mengharapkan keberhasilan dalam menghadapi tindak terorisme di Indonesia dengan melakukan beberapa upaya dan peneliti mencoba untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan dengan menggunakan Teori Kontra Terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler. Dalam teori yang dikemukakan oleh Todd Sandler terdapat dua pendekatan utama dalam upaya kontra terorisme yaitu *Proactive* dan *Defensive*. Pada bab tiga ini, peneliti akan menganalisis dengan dua pendekatan utama *Proactive* dan *Defensive*.

3.1 Strategi Kontra Terorisme Dengan Pendekatan *Proactive*

Strategi Kontra Terorisme dengan melalui pendekatan *Proactive* merupakan sebuah kebijakan yang berfokus melakukan penyerangan dengan menargetkan teroris secara langsung atau melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak terorisme, melakukan pelacakan terhadap sumber daya yang mereka

manfaatkan dalam melakukan aksi terorisme mereka. Langkah tersebut meliputi penangkapan pelaku tindak terorisme, melakukan pelacakan dan pembekuan terhadap aset atau sumber daya yang dimanfaatkan oleh JAD (Sandler 2005).

3.1.1 Penangkapan Pelaku Tindak Terorisme Kelompok JAD

Salah satu upaya kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menangkap para pelaku tindak terorisme JAD di Indonesia. Semenjak awal tahun 2021 hingga terjadi aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar pada bulan Maret 2021, Densus 88 Antiteror telah menangkap ratusan terduga teroris di beberapa wilayah di Indonesia. Pada awal Januari 2021 Densus telah menangkap 20 terduga teroris di sebuah villa di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, 2 diantara 20 terduga teroris melakukan perlawanan sehingga ditembak mati oleh anggota Densus 88, kemudian pada akhir Januari Densus kembali menangkap 5 terduga teroris di Aceh yang terbukti terafiliasi dengan JAD, kemudian pada bulan Februari Densus kembali menangkap beberapa teroris di Kalimantan Barat, dan 22 terduga di Jawa Timur, dan 22 terduga lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga pada bulan Maret Densus menangkap 1 terduga teroris di Banten (BBC News Indonesia 2021).

Pada tanggal 28 Maret 2021 JAD melakukan aksi terorisme bom bunuh diri di sebuah Gereja Katedral di Makassar, hingga pada tanggal 18 Mei 2021 Densus 88 telah menetapkan sebanyak 53 tersangka teroris dalam kasus terorisme bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, dan salah satunya merupakan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para tersangka yang telah ditetapkan telah ditahan di Polda Sulsel hingga 20 hari kedepan, diantaranya

adalah 7 wanita, dan sisanya adalah laki-laki, beserta dengan sejumlah alat bukti, seperti senapan angin dan juga banyak bahan peledak yang telah digunakan oleh pasutri pada aksi terorisme di Gereja Katedral Makassar pada bulan Maret 2021. Semua tersangka masih akan menjalani pemeriksaan lebih dalam, dan Densus 88 telah mengungkapkan bahwa para terduga memiliki sejumlah peran yang berbeda, beberapa memberikan bantuan kepada pasutri pelaku bom bunuh diri dengan mempersiapkan bahan peledak (Mappiwali 2021).

Pada awal tahun 2022 atau lebih tepatnya pada tanggal 9 Februari Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap dua tersangka yang merupakan anggota JAD di wilayah Yogyakarta yang memiliki inisial SU dan RAU. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyatakan bahwa RAU dan SU telah berbaiat dengan ISIS, RAU juga dinyatakan telah melakukan uji coba bom pada 2018 di Bantul, dan SU pernah mengikuti pelatihan militer bersama JAD Jogja 2016-2019 (Dirgantara 2022). Beberapa bulan kemudian atau pada tanggal 4 Agustus Densus 88 kembali menangkap 15 tersangka teroris di beberapa daerah di Aceh, 13 tersangka anggota JI, dan 2 tersangka anggota JAD yang berinisial MR dan MS (Setyadi 2022).

Kemudian, pada bulan September 2022 Densus 88 Antiteror kembali menangkap 8 tersangka terorisme yang tergabung dengan jaringan JAD di wilayah Riau, 1 diantara 8 tersangka merupakan pimpinan jaringan JAD di Riau yang berinisial RP. Menurut Densus 88, delapan tersangka tersebut pernah melakukan latihan militer dua kali di Riau (Chatherine and Prabowo 2022). Densus 88 kemudian kembali menangkap 26 tersangka terorisme selama Desember 2022 dari berbagai daerah. Penangkapan ini terjadi sebelum dan setelah insiden bom

bunuh diri di Bandung yang berhasil menangkap 14 tersangka jaringan JAD dari 26 tersangka (Kompas.tv 2022).

Selama periode 2023 Densus 88 Antiteror telah berhasil menangkap 142 tersangka tindak pidana terorisme di berbagai wilayah di Indonesia, jumlah tersangka tersebut mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan dengan jumlah tersangka tahun 2022 yang berjumlah 248 tersangka yang telah ditangkap. Menurut Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, dari 142 tersangka tindak pidana terorisme diantaranya 16 tersangka berstatus pemeriksaan, 101 tersangka berstatus penyidikan, 23 tersangka sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, serta 2 tersangka lainnya tewas saat melakukan penegakan hukum di Lampung pada April 2023. Diantara 142 tersangka terdapat 29 tersangka yang merupakan anggota kelompok JAD, dan 49 tersangka merupakan anggota kelompok AO yang berafiliasi dengan JAD dan ISIS (ANTARA News 2023).

Pada akhir tahun 2023 Densus 88 Polri telah berhasil menangkap 59 tersangka yang dicurigai memiliki rencana untuk menggagalkan pemilu yang akan diselenggarakan pada Februari 2024. Diantara 59 tersangka yang telah berhasil ditangkap, 40 diantaranya merupakan tersangka yang berasal dari kelompok JAD dan selebihnya berasal dari kelompok JI. Juru bicara Densus 88 mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para tersangka mereka diketahui memiliki rencana untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 dengan melakukan penargetan terhadap kantor-kantor polisi. Menurut kelompok JAD, Demokrasi merupakan “Thaghut” dan sudah pasti demokrasi melanggar hukum, oleh karena itu mereka berniat untuk menggagalkan proses demokrasi yang akan diselenggarakan. Selain menangkap tersangka, polisi juga

menyita beberapa barang bukti seperti beberapa senjata api, peluru tajam, materi serta bahan kimia yang digunakan untuk membuat bahan peledak (Wardah 2023).

Kebijakan penangkapan pelaku tindak terorisme jaringan-jaringan kelompok JAD yang dilakukan oleh Densus 88 di beberapa wilayah di Indonesia dapat memberikan dampak yang cukup signifikan karena kebijakan ini mampu menjadi cara yang efektif dalam melawan tindak pidana terorisme pada aksi selanjutnya. Penangkapan pelaku tindak terorisme merupakan penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku yang sudah berbaiat terhadap jaringan JAD yang kemudian cara ini dinilai efektif karena dengan penangkapan pelaku maka mampu mempengaruhi tindakan terorisme yang akan dilakukan selanjutnya.

3.1.2 Pelacakan dan Pembekuan Sumber dan Aliran Dana Organisasi Jamaah Ansharut Daulah

JAD mengumpulkan dana untuk menjalankan aksinya yaitu salah satunya dengan melalui infak dari beberapa masjid yang berada di tempat JAD melakukan dakwah atau kajian (Pandu 2019), dan dalam sidang pembubaran JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JAD dinyatakan mendapatkan sumber dana operasional organisasinya yaitu berasal dari infak anggota yang mengikuti kegiatan pengajian JAD, dan mendapatkan sokongan dana dari salah satu napi terorisme di Lapas Nusakambangan yang bernama Rois yang berjumlah Rp.27.000.000 (Nugroho 2018). Selain itu, dana yang didapatkan oleh JAD merupakan dana iuran dari anggota JAD itu sendiri yang ditampung dananya kepada Budi Satrio untuk menjalankan aksi teroris JAD (Siddiq 2018).

Densus 88 bersama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia menyatakan adanya penggalangan dana yang dilakukan oleh JI pada

tahun 2021, serta Kepala Bagian Bantuan Operasi mengatakan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan sumbangan-sumbangan untuk organisasi yang tidak diketahui supaya uang sumbangannya tidak tersalurkan kepada kelompok teroris karena terdapat kemungkinan kelompok teroris lain seperti JAD dan ISIS meniru skema penggalangan dana yang dilakukan oleh JI. Densus 88 telah menangkap mahasiswa yang berinisial IA di salah satu perguruan tinggi di Malang karena diduga terlibat dengan penggalangan dana untuk organisasi ISIS di Indonesia pada 23 Mei 2021, dan Densus 88 masih mendalami tersangka IA karena tersangka memiliki hubungan dengan salah satu anggota organisasi JAD (Rahmawaty 2022).

Kelompok teroris JAD diduga melakukan penggalangan dana dengan dalih sumbangan terhadap korban gempa di Cianjur. Hal ini dinyatakan oleh Kepala BNPT RI Boy Rafli dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI di Senayan, Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023. Kepala BNPT Boy Rafli mengungkapkan pihak BNPT akan terus melakukan koordinasi bersama dengan pihak aparat penegak hukum seperti jajaran TNI, Polri, BIN, beserta unsur-unsur Pemda untuk memaksimalkan upaya yang dilakukannya dalam mencegah dan meminimalisir potensi ancaman tindak pidana terorisme yang dilakukan di Indonesia (Rahmawati 2023).

Selain dana yang diperoleh dari sokongan salah satu napi terorisme di Lapas Nusakambangan, polisi telah membongkar aliran dana yang diterima oleh kelompok teroris di Indonesia yaitu JAD. Dana yang diperoleh dari beberapa orang dari lima negara dikirimkan kepada Saefullah kemudian diteruskan kepada Novendri alias Abu Zahrain alias Abu Jundi yang terhubung dengan jaringan

teroris baik di dalam maupun luar negeri yang kemudian dialirkan kepada kelompok JAD (Santoso 2019). Beberapa orang yang mengirim dana kepada para elite kelompok JAD di Indonesia berafiliasi utama dengan ISIS (Halim and Rastika 2019). Beberapa negara yang memberikan dana kepada JAD di Indonesia adalah Maldives, Trinidad Tobago, Jerman, Venezuela, hingga Malaysia Santoso 2019).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan bahwa rekening anggota JAD di Indonesia yang sebelumnya telah dibekukan telah diaktifkan lagi rekening baru dengan tidak mencantumkan nama JAD secara jelas, Kiagus juga menyatakan bahwa lembaganya tidak akan berhenti untuk terus mencari tahu rekening-rekening tersebut. Menurutnya, teroris zaman sekarang tidak lagi menerima uang dari dalam negeri dengan menggunakan modus pencucian uang yang terus berkembang. Saefullah yang merupakan orang yang dipercaya untuk menampung dan mengatur perputaran uang di JAD Indonesia menjadi buronan, dengan menggunakan sistem Western Union untuk mengirim dananya (Riana and Rahma 2019).

3.2 Strategi Kontra Terorisme Dengan Pendekatan *Defensive*

Strategi Kontra Terorisme dengan melalui pendekatan *Defensive* merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan dengan menerapkan pengamanan dengan menggunakan teknologi pengamanan, seperti menggunakan alat pendeteksi bahan peledak atau bom, alat untuk mendeteksi logam, ataupun menggunakan sistem identifikasi biometrik, selain itu melakukan penguatan

infrastruktur target, seperti pemasangan penghalang di area-area strategis seperti gedung pemerintahan, mengerahkan personel keamanan untuk mengamankan target yang memiliki potensi terhadap penyerangan JAD, dan penerapan sistem peringatan dini terkait potensi ancaman terorisme yang akan dilakukan JAD (Sandler 2005).

3.2.1 Peningkatan Keamanan dengan Pemasangan Teknologi Pengamanan

Ancaman tindakan terorisme pada saat ini yang berawal dari konvensional kemudian mengalami pergeseran menggunakan media siber teknologi yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman yang membuat potensi jatuhnya korban semakin besar karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi siber dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan mereka tidak akan meninggalkan pendekatan secara tradisional secara menyeluruh (Apriliasari and Priyanto 2024, 11126). Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar menyatakan kutukan keras terhadap tragedi ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar yang terjadi pada hari Minggu 28 Maret 2021 lalu, karena tindakan tersebut sangat melukai dan menggores keharmonisan sosial di Indonesia. Kepala BNPT juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bekerja sama memerangi tindakan terorisme dan radikalisme, bersama dengan BNPT yang bekerja dengan maksimal dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Menurut Boy, aksi terorisme bukanlah ajaran agama apapun karena semua agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Boy juga menyatakan bahwa target aksi terorisme bisa bukan hanya berfokus pada penyerangan tempat ibadah, bisa saja aksi terorisme

berfokus pada penyerangan individu seperti aparat pemerintah atau polisi (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2021).

Dalam meningkatkan keamanan negara, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti penerapan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) yang dapat melakukan pendeteksian terkait wajah warga negara asing yang telah diterapkan di sejumlah bandara internasional di Indonesia seperti di bandara internasional Soekarno-Hatta dan bandara internasional Ngurah Rai. Sedangkan untuk sekarang bandara domestik belum terpasang teknologi pengenalan wajah yang terkoneksi langsung dengan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP) dan dengan database yang dimiliki negara karena pengimplementasian sistem identifikasi biometrik dengan menggunakan pengenalan wajah pada Satu Platform Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terintegrasi dilakukan untuk memverifikasi setiap orang yang melintas masuk ke dalam negeri dengan melakukan verifikasi pengenalan wajah dengan menggunakan database Indonesia, database asing, dan database cegah-tangkal, serta database interpol sebagai acuannya. Oleh karena itu, sistem pengenalan wajah belum terpasang di bandara domestik karena fokusnya terhadap warga negara asing yang masuk ke dalam negeri (ANTARA News 2023).

Heru selaku Direktur Izin Tinggal Keimigrasian mengatakan bahwa ke depannya penerapan sistem *face recognition* akan diterapkan lebih meluas di beberapa bandara internasional selain bandara Soekarno-Hatta dan bandara Ngurah Rai, yaitu bandara Internasional YIA di Yogyakarta serta bandara Juanda di Surabaya karena penerapan sistem tersebut telah lama digunakan oleh negara-negara lain sehingga pihak imigrasi menginginkan pengamanan bandara

bisa sepadan atau setara dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan sistem *autogate face recognition* sejak lama (Kompas.com 2023).

Selain penerapan teknologi pengenalan wajah untuk mengamankan infrastruktur di Indonesia, pemerintah Indonesia juga meningkatkan keamanan di tempat ibadah dan semua objek vital yang ada di Ibu Kota Jakarta setelah terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan bahwa peningkatan pengamanan tidak hanya di Gereja saja, tetapi tempat-tempat lain seperti Markas Komando, dan semua tempat ibadah atau tempat lainnya akan dilakukan pemantauan oleh polisi dengan instansi-instansi yang berkaitan. Selain pemantauan dengan polisi dan instansi terkait, Yusri juga menyatakan bahwa pihaknya juga fokus dalam penggunaan CCTV di tempat ibadah supaya dapat dipastikan CCTV yang digunakan di tempat ibadah dapat berfungsi dengan baik. Polri juga melakukan patroli dengan skala besar serta melakukan *screening entry* untuk orang yang hendak memasuki gereja atau tempat ibadah lainnya (Rassat 2021).

3.2.2 Penguatan Infrastruktur Target Kelompok JAD

Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap ekstremisme yang berbasis kekerasan yang menuju pada terorisme. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 yang didasari oleh meningkatnya ancaman ekstremisme yang berbasis kekerasan yang menuju pada tindakan terorisme di Indonesia yang membuat kondisi rawan sehingga membuat ancaman terhadap hak atas rasa aman manusia dan ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional.

Dalam Perpres terdapat Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan secara terencana dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2021).

RAN PE akan diwujudkan dengan menggunakan langkah-langkah seperti koordinasi antarkementerian/lembaga, partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melakukan pengawasan seperti deteksi dini dan cegah dini, serta perhatian terhadap para korban tindak pidana Terorisme dan perlindungan infrastruktur serta objek vital lainnya dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. RAN PE juga memiliki sasaran khusus yaitu meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga, meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program, pengembangan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan, meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, serta meningkatkan kerjasama internasional seperti multilateral atau bilateral dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2021).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian atau lembaga yang termasuk pemerintah daerah dalam aksi terpadu sebagai bentuk pendekatan *whole of government* (seluruh pemerintahan) dan *whole of society* (seluruh masyarakat). Inovasi program juga meliputi kegiatan dengan memberikan perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang melakukan kolaborasi

dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi yang diharapkan dapat secara mandiri melakukan deteksi dini serta upaya pencegahan tindak terorisme. Objek vital strategis yang dimaksud merupakan bangunan, kawasan, usaha, instalasi yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang, negara, serta sumber pendapatan negara (Huda 2024).

Selain itu, dalam melakukan penguatan infrastruktur terhadap target kelompok terorisme JAD, BNPT Republik Indonesia meluncurkan sistem CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) yang dilakukan untuk mendukung keamanan siber dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE agar berjalan dengan lebih aman dan lebih terlindungi. Sistem CSIRT dalam BNPT akan memiliki peran yang penting dalam mendeteksi serta mencegah dan upaya penanganan terhadap ancaman keamanan siber dengan tujuan untuk mengamankan infrastruktur informasi yang vital dan penting dalam keberlangsungan bernegara serta memiliki tujuan untuk mengelola keamanan informasi dengan menggunakan prinsip jaminan keamanan informasi yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan keutuhan (*integrity*) terhadap semua aset informasi yang dimiliki oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2023).

Computer Security Incident Response Team hadir untuk dapat mendukung transformasi digital pemerintah yang lebih terpercaya yang merupakan pilar utama dalam layanan digital nasional dalam SPBE. CSIRT juga memiliki peran penting dalam menguatkan keamanan informasi sehingga mampu membuat layanan digital pemerintah yang lebih terpercaya. Selain BNPT, CSIRT juga diluncurkan

oleh beberapa Lembaga atau Kementerian pada sektor pemerintahan pusat, yaitu diantaranya adalah Kementerian Koordinator dalam bidang sosial, bidang kemaritiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Arsip Nasional, Sekretariat Kabinet dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Transmigrasi Republik Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2023).

3.2.3 Peran Personel Keamanan Dalam Mengamankan Target Kelompok JAD

Upaya Nasional dan Internasional dilakukan dalam penanggulangan tindak terorisme dilakukan dengan cara memperluas dan memperdalam kerjasama antar lembaga. Dalam hal ini, eksplorasi bidang-bidang baru dalam kerjasama internasional dengan tujuan untuk melawan terorisme menjadi sebuah keutamaan ketika sebuah aksi tindakan terorisme semakin intensif. Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh Menkopolhukam RI pada tahun 2002 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang terdiri dari pejabat lintas departemen seperti Kemenlu, Kemenhan, Kemendagri, TNI, Polri, Badan Intelijen Nasional, Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia dan langsung berada di bawah koordinasi Menkopolhukam RI merupakan embrio dari terbentuknya BNPT. Tujuan dibentuknya DKPT itu sendiri adalah untuk mensinergikan serta mengkoordinasikan institusi-institusi yang terdapat dalam bidang penanggulangan terorisme di Indonesia (Kurniawan et al. 2020, 21).

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam menyatakan bahwa ledakan yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar tersebut memiliki daya *high explosive*, dan pasca tragedi ledakan bom bunuh diri di depan Gereja tersebut membuat Kepolisian Daerah Sulsel tersebut

menjadi lebih meningkatkan keamanan pada sejumlah tempat ibadah di Makassar. Kapolri juga menegaskan bahwa pihak kepolisian langsung menyelidiki dan langsung mengadakan olah tempat perkara untuk menelusuri lebih dalam pelaku dari aksi teroris tersebut, dan menjamin keamanan dan ketertiban kepada masyarakat setempat. Kepolisian setempat juga menyatakan akan ada peningkatan operasi rutin di tempat ibadah pasca tragedi ledakan tersebut (Ferdiansyah 2021).

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk teroris di Indonesia serta memberi perintah kepada Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat karena menyusul adanya serangan teroris di Gereja Katedral Makassar dan Mabes Polri pada tahun 2021. Panglima TNI kemudian memerintahkan seluruh jajaran TNI dalam rangka merespons perintah dari Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan pengamanan seperti gereja, tempat keramaian, dan objek vital nasional dengan melakukan patroli bersama serta dengan mendirikan Posko Komando Teknis di titik-titik yang telah ditentukan yang dilakukan oleh TNI dan Polri (Nurdiyanto and Futaki 2021).

Kepala BNPT RI telah mengusulkan sebuah mekanisme kontrol rumah ibadah dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, dengan mengusulkan penekanan terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar rumah ibadah dalam pengawasan karena tidak selalu tentang kontrol penuh dari pemerintah yang hanya satu pihak. Rycko menjelaskan keterlibatan masyarakat sekitar tersebut adalah seperti pengurus masjid, dan tokoh agama setempat agar bisa berkontribusi dengan memberikan laporan aktivitas-aktivitas mencurigakan yang menjuru kepada radikalisasi (Kompas.tv 2023). BNPT RI juga akan melakukan asesmen

terhadap sistem pengamanan di ruang publik atau tempat keramaian umum dan tempat ibadah dengan tujuan untuk memastikan pengamanan tempat ibadah menjelang kegiatan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Kepala BNPT RI juga mengamankan tempat publik dengan tujuan untuk memastikan keamanan Pemilu 2024 dengan lancar tanpa kekerasan dan serangan teror karena menurutnya melakukan pengamanan terhadap sarana dan prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam mencegah tindak pidana terorisme memiliki dasar hukum dalam Peraturan BNPT Nomor 3 tahun 2020 (Khalid 2023).

Densus 88 dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Banser NU, dan Kokam Muhammadiyah di setiap wilayah pengamanan gereja melakukan pengamanan seperti melakukan pola sterilisasi di tempat ibadah, menyiapkan x-ray dan anjing k-9 di gereja-gereja untuk mengamankan gereja-gereja pada saat melakukan perayaan Natal pada tahun 2022 (Putranegara 2022). Dan pada akhir tahun 2023 di Bengkulu, sebanyak 1.800 personel keamanan gabungan dari TNI, Polri dikerahkan di gereja-gereja yang ada di Bengkulu dengan tujuan untuk memastikan perayaan Natal dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pengamanan terhadap perayaan Nataru ditandai dengan mengadakan Operasi Lilin Nala 2023 yang akan berlangsung selama 2 minggu kedepan di Polda Bengkulu. Petugas keamanan juga akan melakukan patroli pengamanan pada perayaan tahun baru dengan melakukan pemantauan terhadap penggunaan kembang api, dan juga melakukan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di tempat wisata yang ramai dikunjungi seperti pantai yang diungkapkan oleh Kapolda Bengkulu (Misutra 2023).

3.2.4 Penerapan Sistem Peringatan Dini Ancaman Kelompok JAD

Salah satu sistem yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan P/CVE (*Preventing and Countering Violent Extremism*) atau dalam upaya menerapkan sistem peringatan dini terhadap ancaman kelompok teroris di Indonesia terutama JAD untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam melakukan upaya deteksi dini serta penanganan dini terhadap ancaman ekstrimisme yang berbasis kekerasan adalah *Early Warning Early Response* (EWER). Dalam sistem EWER terdapat 4 pilar yaitu kebijakan publik, mekanisme penanganan kasus, kohesi sosial masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2023).

Early Warning Early Response (EWER) merupakan definisi dari *Early Warning* dan *Early Response*. *Early Warning* diartikan sebagai suatu proses yang memberikan peringatan terhadap para pengambil keputusan terhadap potensi pecahnya, dan kebangkitan kembali dari konflik kekerasan serta mendorong pemahaman terhadap para pengambil keputusan tentang dampak dan sifat konflik kekerasan. Proses *Early Warning* melibatkan pengumpulan serta analisis terhadap data terkait konflik secara bertahap dengan cara memantau serta memberikan laporan indikator konflik secara sistematis. Sistem peringatan dini terhubung dengan instrumen respons (Defontaine 2019).

Selain *Early Warning*, terdapat *Early Response* yang diartikan sebagai segala inisiatif yang muncul segera setelah ancaman potensi munculnya konflik kekerasan yang teridentifikasi dengan tujuan untuk mengelola, serta menyelesaikan atau mencegah terhadap konflik kekerasan tersebut dengan menggunakan instrumen serta mekanisme pencegahan. Dalam *Early Response*

terdapat berbagai jenis respon yang dimaksud yaitu mulai dari pencarian terhadap fakta-fakta, melakukan mediasi serta negosiasi, dialog perdamaian yang dilakukan dengan cara diplomasi preventif, atau mekanisme yang lebih kuat seperti diberikannya sanksi (Defontaine 2019).

Negara Indonesia telah melakukan beberapa upaya yang telah disebutkan di atas dapat membantu mengurangi eksistensi terorisme di Indonesia, dan juga dijelaskan bahwa negara Indonesia telah berhasil mengungkap aksi tindakan terorisme yang dilakukan oleh JAD dengan menangkap pelaku-pelaku tindak terorisme terutama terhadap kelompok JAD. Namun, tindakan yang dilakukan Indonesia masih terdapat kendala yang dihadapinya sehingga dapat membuat pemerintah Indonesia berbenah terhadap setiap tindakan yang akan dilakukannya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tindakan terorisme di Indonesia sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 tidak bisa dibiarkan, terutama tindakan terorisme yang dilakukan oleh organisasi JAD, sehingga pemerintah Indonesia harus merespons terhadap tindakan terorisme tersebut. Dengan menggunakan teori Kontra Terorisme oleh Todd Sandler dengan melalui pendekatan *Proactive* dan *Defensive*, dengan upaya *Proactive* yang merupakan sebuah langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menargetkan kelompok teroris dengan melakukan penyerangan terhadap kamp-kamp pelatihan teroris, pimpinan teroris, melakukan pembekuan aset yang berkaitan, serta pengumpulan intelijen untuk melakukan infiltrasi ke dalam jaringan kelompok JAD. Kemudian, upaya *Defensive* mencakup upaya penerapan teknologi pengamanan, penguatan infrastruktur target, pengerahan personel keamanan, dan penerapan sistem peringatan dini terkait potensi ancaman terorisme.(Sandler 2005).

Upaya pendekatan *Proactive* telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak terorisme oleh JAD. Sejak awal tahun 2021 Densus 88 Antiteror telah menangkap ratusan terduga teroris di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian sepanjang tahun 2022 Densus 88 telah menangkap 248 tersangka yang menyatakan jumlah tersangka tersebut lebih banyak dibandingkan di tahun 2023 yang menangkap 142 tersangka. Jumlah tersangka tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan jumlah di tahun 2022. Selain itu, pemerintah Indonesia memperingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam

menyalurkan sumbangan kepada organisasi yang tidak jelas agar dana tersebut tidak tersalurkan kepada kelompok teroris. Kepala BNPT RI mengungkapkan bahwa kelompok JAD diduga melakukan penggalangan dana dengan dalih sumbangan untuk korban gempa di Cianjur, serta mahasiswa berinisial IA di Malang ditangkap karena diduga terlibat dalam penggalangan dana yang memiliki hubungan dengan anggota JAD. Selain itu, polisi menyatakan aliran dana JAD diperoleh dari sokongan napi di Lapas Nusakambangan dan dari beberapa negara seperti Maladewa, Trinidad dan Tobago, Jerman, Venezuela, dan Malaysia. Kepala PPATK juga menyatakan bahwa adanya rekening anggota JAD yang diaktifkan kembali setelah telah dibekukan dengan menggunakan nama lain.

Upaya pendekatan *Defensive* juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan upaya penerapan teknologi *face recognition* yang telah diterapkan di sejumlah bandara internasional di Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia juga meningkatkan keamanan di tempat ibadah dan semua objek vital dengan memastikan CCTV yang digunakan dapat berfungsi dengan baik, serta melakukan patroli dengan skala besar dengan melakukan *screening entry*. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 yang terdapat Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di dalamnya dengan upaya koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan infrastruktur. Selain itu, BNPT RI meluncurkan sistem CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) yang dilakukan untuk mendukung keamanan siber dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), transformasi digital pemerintah supaya lebih terpercaya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga melibatkan personel keamanan seperti TNI, dan Polri dalam menghadapi organisasi JAD di Indonesia seperti mengerahkan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan tempat ibadah, tempat keramaian, objek vital nasional dengan melakukan patroli gabungan serta menyediakan x-ray dan anjing k-9, serta mendirikan posko pengamanan guna merespons tragedi bom bunuh diri di Makassar dan mengamankan acara Natal dan Tahun Baru di wilayah-wilayah di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membuat sistem Early Warning Early Response (EWER) sebagai upaya menerapkan sistem peringatan dini terhadap ancaman kelompok teroris di Indonesia terutama terhadap JAD, respon yang dimaksud yaitu mulai dari pencarian terhadap fakta-fakta, melakukan mediasi serta negosiasi, dialog perdamaian, atau mekanisme yang lebih kuat.

4.2 Rekomendasi

Pada penelitian kali ini penulis membahas bagaimana Kebijakan Kontra Terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Jamaah Ansharut Daulah di Indonesia pada tahun 2021-2023. Berdasarkan yang telah dibahas dalam penelitian ini, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan wawancara secara langsung kepada para pihak yang memiliki posisi dalam bidang terorisme seperti BNPT, dan lain sebagainya agar mendapat data yang lebih konkret dan lebih luas, karena penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan perolehan data, namun penulis berharap penelitian kali ini dapat dipahami oleh para pembaca dan mampu menjadi rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam bidang anti terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Daring

Amindoni, Ayomi. 2018. "Sel-sel JAD yang tertidur 'mulai bangkit' waspada aksi serupa bom Surabaya." bbc.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44022493>.

ANTARA News. 2023. "Imigrasi sebut teknologi pengenalan bisa deteksi wajah WNA di bandara." antaranews.

<https://www.antaranews.com/berita/3866589/imigrasi-sebut-teknologi-pengenal-bisa-deteksi-wajah-wna-di-bandara>.

ANTARA News. 2023. "Densus catat penurunan jumlah tersangka terorisme sepanjang 2023." antaranewscom.

<https://www.antaranews.com/berita/3880407/densus-catat-penurunan-jumlah-tersangka-terorisme-sepanjang-2023?utm.com>.

Annur, Cindy M. 2022. "Kembali Meningkat, Polri Ungkap 370 Tersangka Terorisme di Indonesia Sepanjang 2021." Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021>.

Aziz, Nuraki. 2018. "Jamaah Ansharut Daulah resmi dilarang, anggotanya 'mungkin pakai nama baru.'" BBC.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45019553>.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2021. "Kepala BNPT Kutuk Keras Tragedi Bom Gereja Katedral di Makassar." bnpt.go.id.

<https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-kutuk-keras-tragedi-bom-gereja-katedral-di-makassar>.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2021. “Indonesia dan Inggris Teken Kerja Sama Penanggulangan Terorisme.” web.bnpt.go.id.

<https://web.bnpt.go.id/indonesia-dan-inggris-teken-kerja-sama-penanggulangan-terorisme>.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2022. “Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Melalui Pertemuan Konsultasi Bilateral ke-8.” bnpt.go.id.

<https://bnpt.go.id/indonesia-australia-perkuat-kerja-sama-penanggulangan-terorisme-melalui-pertemuan-konsultasi-bilateral-ke-8>.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2023. “BNPT RI Apresiasi Kesepakatan 10 Negara Anggota ASEAN dan Amerika Serikat Gunakan Mekanisme Early Warning Early Response dalam Mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan.” bnpt.go.id.

<https://www.bnpt.go.id/bnpt-ri-apresiasi-kesepakatan-10-negara-anggota-asean-dan-amerika-serikat-gunakan-mekanisme-early-warning-early-response-dalam-mencegah-ekstremisme-berbasis-kekerasan>.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2023. “BNPT RI Launching CSIRT Dukung Keamanan Siber dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).” bnpt.go.id.

<https://www.bnpt.go.id/bnpt-ri-launching-csirt-dukung-keamanan-siber-dalam-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe>.

BBC News Indonesia. 2021. “Bom Makassar: Dua terduga pengebom 'pengantin baru', polisi temukan 'lima bom aktif' di Bekasi.” BBC.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56553477>.

- BBC News Indonesia. 2021. "Bom Makassar: Pelaku diduga kelompok JAD sebagai 'balas dendam dan aksi jelang bulan Ramadan.'" BBC.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56556322>.
- BBC News Indonesia. 2020. "Pengakuan napi terorisme yang 'menolak' ikut baiat ISIS: 'Saya was-was sekali, kalau lengah, bisa lewat.'" BBC.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50408542>.
- Chaterine, Rahel N., and Dani Prabowo. 2022. "8 Tersangka Teroris JAD Riau Ditangkap, Salah Satunya Terhubung Grup Telegram Jihad." nasionalkompascom.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/09433151/8-tersangka-teroris-jad-riau-ditangkap-salah-satunya-terhubung-grup-telegram?utm.com>.
- CNN Indonesia. 2017. "AS Kategorikan JAD Organisasi Teroris." cnnindonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170111153955-106-185616/as-kategorikan-jad-organisasi-teroris>.
- Dalimunthe, Ihsan. 2018. "Rekam Jejak Aman Abdurrahman, 'Singa Tauhid' ISIS Indonesia." cnnindonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180518104434-12-299177/rekam-jejak-aman-abdurrahman-singa-tauhid-isis-indonesia>.
- DATABASE PERATURAN. 2018. "UU No. 5 Tahun 2015." peraturan.bpk.go.id.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689>.
- DATABASE PERATURAN. 2018. "UU No. 5 Tahun 2018." Peraturan BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>.
- Defontaine, Catherine. 2019. "Setting up early warning and response systems to prevent violent conflicts and save lives." World Bank Blogs.

<https://blogs.worldbank.org/en/dev4peace/setting-early-warning-and-response-systems-prevent-violent-conflicts-and-save-lives>.

Dirgantara, Adhyasta. 2022. "Densus 88 Tangkap 2 Tersangka Teroris Jaringan JAD di Yogyakarta." detikcom.

<https://news.detik.com/berita/d-5936088/densus-88-tangkap-2-tersangka-teroris-jaringan-jad-di-yogyakarta?utm.com>.

Durohman, Ibad, Bahtiar Rifai, and Isfari Hikmat. 2016. "MEREKRUT ISIS DARI BALIK JERUJI." news.detik.

<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20160203/Merekrut-ISIS-dari-Balik-Jeruji/>.

Fathurohman, Irfan. 2018. "Begini Kronologi Terbentuknya Jamaah Ansharut Daulah." IDN Times.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfan-fathurohman/begini-kronologi-terbentuknya-jamaah-ansharut-daulah>.

Ferdiansyah, Benardy. 2021. "Round Up - Ramai-ramai kutuk aksi bom bunuh diri di Makassar." Antaranews.

<https://www.antaranews.com/berita/2068318/round-up-ramai-ramai-kutuk-aksi-bom-bunuh-diri-di-makassar>.

Gual, Marselinus. 2021. "Zakiah Aini, kaum milenial, dan bahaya takfiri." alinea.id.

<https://www.alinea.id/nasional/zakiah-aini-kaum-milenial-dan-bahaya-takfiri-b2c1j92uM>.

Halim, Devina, and Icha Rastika. 2019. "Pemberi Dana ke Elite JAD Indonesia Diduga Berafiliasi dengan ISIS." nasional.kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/24/20034031/pemberi-dana-ke-elite-jad-indonesia-diduga-berafiliasi-dengan-isis>.

Huda, Mas A. 2024. "BNPT: Objek Vital Strategis Kini Dijadikan Target Serangan Terorisme." news.republika.co.id.

<https://news.republika.co.id/berita/soqdh487/bnpt-objek-vital-strategis-ki-ni-dijadikan-target-serangan-terorisme>.

Hukum Online. 2010. "Densus 88 Harus Hindari Extra Judicial Killing." hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/densus-88-harus-hindari-iextra-judicial-killingi-1t4bf7515bab2b6>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2025. "Portal Kemlu." Portal Kemlu. <https://kemlu.go.id/kebijakan/kerja-sama-bilateral>.

Khalid, Idham. 2023. "BNPT Akan Asesmen Ruang Publik Guna Pastikan Keamanan Natal dan Tahun Baru." news.detik.

<https://news.detik.com/berita/d-7107426/bnpt-akan-asesmen-ruang-publik-guna-pastikan-keamanan-natal-dan-tahun-baru>.

Kompas.com. 2023. "Berlaku di Beberapa Bandara, Autogate dengan Face Recognition Diklaim Banyak Manfaat." Travel Kompas.

<https://travel.kompas.com/read/2023/10/12/180300027/berlaku-di-beberapa-bandara-autogate-dengan-face-recognition-diklaim-banyak>.

Kompas.tv. 2022. "Polri Tangkap 26 Orang dalam Kasus Terorisme Sepanjang Desember 2022." kompastv.

<https://www.kompas.tv/nasional/360657/polri-tangkap-26-orang-dalam-kasus-terorisme-sepanjang-desember-2022?utm.com>.

Kompas.tv. 2023. “Kepala BNPT RI Jelaskan Usulan Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar.” kompas.tv.

<https://www.kompas.tv/advertorial/441047/kepala-bnpt-ri-jelaskan-usulan-mekanisme-kontrol-rumah-ibadah-harus-melibatkan-masyarakat-sekitar>.

Mappiwali, Hermawan. 2021. “53 Teroris Jadi Tersangka Kasus Bom Gereja Katedral Makassar.” detiknews.

<https://news.detik.com/berita/d-5573160/53-teroris-jadi-tersangka-kasus-bom-gereja-katedral-makassar>.

Misutra, Beta. 2023. “1.800 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Natal dan Tahun Baru di Bengkulu.” bengkulu.tribunnews.com.

<https://bengkulu.tribunnews.com/2023/12/21/1800-personel-gabungan-disiagakan-amankan-natal-dan-tahun-baru-di-bengkulu>.

Mumpuni, Ayu. 2023. “Teroris Jaringan JAD Paling Banyak Ditindak Sepanjang 2023.” Tirto.id.

<https://tirto.id/teroris-jaringan-jad-paling-banyak-ditindak-sepanjang-2023-gTMc>.

Nugroho, Bagus P. 2018. “Jejak Hitam JAD di Indonesia hingga Dibekukan.” detikNews.

<https://news.detik.com/berita/d-4142764/jejak-hitam-jad-di-indonesia-hingga-dibekukan>.

Nugroho, Kelik W. 2018. “JAD Dapat Sokongan Dana Rp 27 Juta dari Napi Teroris di Nusakambangan.” kumparan.com.

<https://kumparan.com/kumparannews/jad-dapat-sokongan-dana-rp-27-juta-dari-napi-teroris-di-nusakambangan-27431110790552543/full>.

- Nurdiyanto, Wahyu, and Sofyan S. Futaki. 2021. "Panglima TNI Instruksikan Peningkatan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Tempat Ibadah." timesindonesia.
<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/338438/panglima-tni-instruksikan-peningkatan-pengamanan-objek-vital-nasional-dan-tempat-ibadah>.
- Pandu, Pradipta. 2019. "Riwayat Kelompok Teroris Jamaah Ansharut Daulah." kompas.id.
https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/11/riwayat-kelompok-teroris-jamaah-ansharut-daulah?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
- Putranegara. 2022. "Densus 88 Bakal Amankan Gereja saat Natal." idxchannel.
<https://www.idxchannel.com/economics/densus-88-bakal-amankan-gereja-saat-natal/2>.
- Putri, Zunita A. 2018. "Terbentuknya JAD dari Aman Abdurrahman di Nusakambangan." detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-4026822/terbentuknya-jad-dari-aman-abdurrahman-di-nusakambangan>.
- Rahmawati, Dwi. 2023. "BNPT Ungkap Kelompok Teroris JAD Galang Dana Lewat Gempa Cianjur." news.detik.
<https://news.detik.com/berita/d-6566144/bnpt-ungkap-kelompok-teroris-jad-galang-dana-lewat-gempa-cianjur>.
- Rahmawaty, Laily. 2022. "Densus 88 ingatkan masyarakat waspada penggalangan dana teroris." ANTARA News.

<https://www.antaraneews.com/berita/2901013/densus-88-ingatkan-masyarakat-waspada-penggalangan-dana-teroris>.

Rassat, Fianda S. 2021. "Polda Metro tingkatkan pengamanan tempat ibadah." antaraneews.

<https://www.antaraneews.com/berita/2067994/polda-metro-tingkatkan-pengamanan-tempat-ibadah>.

Riana, Friski, and Andita Rahma. 2019. "Kepala PPATK Sebut Rekening Anggota JAD Aktif Lagi." tempo.co.

<https://www.tempo.co/hukum/kepala-ppatk-sebut-rekening-anggota-jad-aktif-lagi-683211>.

Rohmawati, Yuni. 2023. "59 Tersangka Teroris Diringkus Densus 88, Diduga Ingin Gagalkan Pemilu 2024." tempo.co.

<https://www.tempo.co/hukum/59-tersangka-teroris-diringkus-densus-88-diduga-ingin-gagalkan-pemilu-2024-126436>.

Santoso, Audrey. 2019. "Teroris Novendri Terima Uang dari 5 Negara untuk Danai JAD-MIT Baca artikel detiknews, "Teroris Novendri Terima Uang dari 5 Negara untuk Danai JAD-MIT." news.detik.com.

<https://news.detik.com/berita/d-4635974/teroris-novendri-terima-uang-dari-5-negara-untuk-danai-jad-mit>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021. "Inilah Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme." setkab.go.id.

<https://setkab.go.id/inilah-perpres-rencana-aksi-nasional-pencegahan-dan-penanggulangan-ekstremisme-berbasis-kekerasan>.

- Setyadi, Agus. 2022. "Densus 88 Tangkap 15 Terduga Teroris Jaringan JI dan JAD di Aceh." detikcom.
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6215623/densus-88-tangkap-15-terduga-teroris-jaringan-ji-dan-jad-di-aceh?utm.com>.
- Siddiq, Taufiq. 2018. "Polri: Dugaan Sementara Pendanaan Teroris JAD dari Iuran Anggota." tempo.co.
<https://www.tempo.co/politik/polri-dugaan-mentara-pendanaan-teroris-jad-dari-iuran-anggota-924554>.
- Syeirazi, M. K. 2018. "Anatomi Radikalisme di Indonesia (6): Dari JI ke JAT, lalu JAD." nu.or.id.
<https://www.nu.or.id/opini/anatomi-radikalisme-di-indonesia-6-dari-ji-ke-jat-lalu-jad-PPIBz>.
- Tifada, Detha A. 2021. "Akar Sejarah Jamaah Ansharut Daulah: Niat Aman Abdurrahman Mendirikan Khilafah." voi.id.
<https://voi.id/memori/41490/akar-sejarah-jamaah-ansharut-daulah-niat-aman-abdurrahman-mendirikan-khilafah>.
- Tim detikcom. 2021. "Daftar Serangan Teror JAD: Bom Kampung Melayu hingga Makassar." Detik.com.
<https://news.detik.com/berita/d-5512211/daftar-serangan-teror-jad-bom-kampung-melayu-hingga-makassar/2>.
- tirto.id. 2018. "Aman Abdurrahman Napiter Indonesia (2004)." tirto.id.
<https://tirto.id/tokoh/aman-abdurrahman-by8>.
- Wardah, Fathiyah. 2023. "Diduga Berencana Ganggu Pemilu 2024, Puluhan Anggota JAD Ditangkap." VOA Indonesia.

<https://www.voaindonesia.com/a/densus-88-tangkap-59-tersangka-militan-yang-berencana-kacaukan-pemilu/7334228.html>.

Artikel Jurnal

- Apriliasari, Annisa Y., and Sapto Priyanto. 2024. "Ibu Kota Negara (IKN) dan Mitigasi Ancaman Terorisme: Pendekatan Kesejahteraan untuk Pencegahan Aksi Kejahatan di Indonesia." *UNES LAW REVIEW* 06, no. 04 (06): 11120-11129.
- Asrori, Saifudin. 2019. "Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia." *JURNAL AQLAM : Journal of Islam and Plurality* 04, no. 01 (06).
<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/viewFile/911/705>.
- Habibullah, Muhammad. 2023. "Extremism Counter-narration of the Jamaah Ansharut Daulah within the Perspective of Ludwig Wittgenstein Language Games Theory." *International Journal Of Islamicate Social Studies* 01, no. 01 (05). <https://journal.nursyamcentre.com/index.php/IJISS>.
- Hutami, Lestari S., H. Azhar, and Nurul Aulia. 2023. "Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme Antara Indonesia Dan United Kingdom dengan Pendekatan Strategi 4 Pilar Kontra Terorisme." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 08, no. 02 (05): 94-101.
- Kurniawan, Syukri, Anditya R. Putri, Tedy Septiyo, and Pujiyono. 2020. "Upaya Non-Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 04, no. 01 (04): 14-26.

- Maslikan, and Sapto Priyanto. 2025. "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme Terhadap Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 05 (05).
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>.
- Nugroho, Anton P. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. N.p.: Penerbit Widina.
https://www.researchgate.net/publication/364383690_Metode_Pengumpulan_Data.
- Paamsyah, Joni, Hengki Irawan, Heldi Feprizon, Mulki A. Perdana, and Zainab O. Jainah. 2023. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 03 (06).
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6384/4631>.
- Sandler, Todd. 2005. "Collective versus unilateral responses to terrorism."
 personal.utdallas.edu.
https://personal.utdallas.edu/~tms063000/website/Public_Choice_2005.pdf
- Tabrani, Dedy, and Aly Ashghor. 2023. "Movement And Thoughts Of Jamaah Ansharut Daulah (JAD): Terrorism Group In Indonesia." *International Journal of Research in Education Humanities and Commerce* 04 (04): 130-141.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/105478055/ijrehc04_66-libre.pdf?1693748133=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMovement_and_Thoughts_of_Jamaah_Asharut.pdf&Expires=1719580724&Signature=WBgmQxxyiCTCFivVOWkiFe333fTCoZ2LARMoWRiwH~hrRq~ODVI.

Walidin, Warul, Saifullah, and Tabrani ZA. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. N.p.: FTK Ar-Raniry Press.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1301/1/Full%20Buku%20MP%20Kualitatif%20&%20Grounded%20Theory.pdf>.

Wisesa, Raka G. 2021. “Keberhasilan dan Kegagalan Indonesia dalam Kebijakan Kontraterorisme.” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 07 (01): 1-12.

file:///D:/Referensi%20Skripsi/(Tinjauan%20Pustaka)%20Keberhasilan%20dan%20Kegagalan%20Indonesia%20dalam%20Kebijakan%20Kontraterorisme.pdf.